

PERILAKU POLITIK PRAGMATIS DALAM KEHIDUPAN POLITIK KONTEMPORER: KAJIAN ATAS MENYURUTNYA PERAN IDEOLOGI POLITIK DI ERA REFORMASI

Firman Noor

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)

Email: firman.noor@yahoo.co.id.

Diterima: 3-1-2014

Direvisi: 28-1-2014

Disetujui: 3-2-2014

ABSTRACT

This paper examines the fading of political ideology both as a people's reference and party's guidance in making strategy and conducting political behavior in contemporary Indonesia politics. Some current important political moments such as election, presidential election, the making of coalition, government's behavior or local election indicate the emergence of pragmatism influencing those processes and results, which replace the role of political ideology. This phenomenon is also indicated by the present of new approach in understanding the behaviour of political parties that no longer implements political ideology as the foundation. Such approach underscores pragmatism as an influential factor that moves political ideology in guiding political activities of most parties in Indonesia.

Keywords: *Ideology, pragmatism, culture, politics, behavior*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang menurunnya peran ideologi politik sebagai landasan yang sepatutnya dirujuk oleh masyarakat dan partai politik dalam kehidupan berpolitik, baik dalam soal menyusun strategi maupun berperilaku. Beberapa momen politik penting, seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pembentukan koalisi, perilaku pemerintah maupun pilkada saat ini semakin menunjukkan geliat pengaruh pragmatisme, yang semakin meminggirkan ideologi politik. Fenomena semakin tidak relevannya kacamata ideologis dalam melihat dan memaknai keberadaan partai politik, berikut perilakunya juga mengindikasikan ketersingkirannya itu. Kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas di kebanyakan partai politik dewasa ini lebih ditentukan oleh kepentingan pragmatis semata.

Kata kunci: *Ideologi, pragmatisme, budaya, politik, perilaku*

PENDAHULUAN

“*The end of ideology*”, demikianlah simpulan Fukuyama (1992) lebih dari dua dekade lalu atas perkembangan masyarakat dunia dewasa ini. Apa yang dimaksud oleh Fukuyama jelas bukanlah eksistensi ideologi telah berakhir, melainkan berakhirnya tantangan ideologis bagi demokrasi liberal dan kapitalisme pascaruntuhnya benteng diktatorial dan komunisme di Uni Soviet. Bagi Fukuyama, kejatuhan komunisme telah menetapkan posisi demokrasi liberal sebagai ideologi dominan yang menjadi semacam episentrum ideologis tanpa lawan yang berarti, sebagai ujung dari perjalanan sejarah manusia (*the end of history*).

Konsep “telah berakhirnya ideologi” di Indonesia dapat diterapkan dalam konteks terbatas. Masyarakat tidak lagi menempatkan ideologi

sebagai acuan manakala melakukan ritual politik saat masuk dalam bilik-bilik suara, juga saat melakukan kampanye untuk mendapatkan suara. Mereka cenderung terlihat menjadi lebih pragmatis dalam berpolitik. Kehadiran sikap pragmatis tersebut pada akhirnya cukup mengesampingkan perhitungan-perhitungan yang lebih normatif, termasuk di dalamnya perhitungan atas dasar norma kebudayaan, kepercayaan atau aliran politik yang kemudian kerap juga disebut sebagai ideologi politik. Dengan demikian, ideologi politik tampaknya tidak lagi menjadi elemen yang cukup kuat untuk menjadi rujukan perilaku politik baik partai politik maupun masyarakat kebanyakan.

Studi yang dilakukan oleh Mujani dan Liddle (2010), misalnya, mengindikasikan beberapa faktor yang menentukan perilaku pemilih yang

terjadi dalam tiga kali pemilu terakhir. Menurut mereka figuritas dan rasa kedekatan dengan partai tertentu merupakan faktor-faktor yang menentukan perilaku memilih pada Pemilu 1999 dan 2004. Studi mereka menyimpulkan bahwa pada Pemilu 2009 pemilih lebih dipengaruhi oleh media dan kapabilitas kandidat. Mereka mengatakan: “*voters were influenced in addition by the media campaigns of parties and presidential candidates, by their perceptions of the state of the national economy and by their evaluations of governmental performance*” (Mujani dan Liddle 2010: 97).

Studi dari dua orang ahli politik Indonesia tersebut—yang secara kontinum sejak awal reformasi memotret perilaku politik masyarakat dalam pemilu—mengukuhkan pandangan yang melihat bahwa politik aliran atau ideologi politik memainkan peran terbatas dalam menentukan perilaku politik. Masyarakat saat ini semakin melihat hal-hal di luar itu, termasuk lebih melihat pilihan-pilihan kebijakan dan performa pemerintah dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini berupaya menganalisis penurunan peran ideologi politik dalam kehidupan politik saat ini. Penulis tidak bermaksud menyatakan bahwa peran ideologi politik itu sudah tidak ada sama sekali, namun secara umum perannya sudah semakin rendah dan digantikan oleh hal lain yang bersifat pragmatis.

Sehubungan dengan alasan tersebut, tulisan ini menjajaki dua persoalan. *Pertama*, mengkaji pergeseran tipologisasi partai, dari yang semula sarat bernuansakan politik aliran terutama sejak tahun 1955 hingga 1965, menuju kondisi kekinian yang semakin menunjukkan adanya “pola campuran” antara aliran dan non-aliran, yang belakangan bahkan terlihat semakin oportunistik.

Kedua, mengkaji beberapa kasus dalam momen-momen politik penting, seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pembentukan koalisi, hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk fenomena terbaru yakni munculnya politik dinasti di dalamnya. Tujuannya untuk memperlihatkan beberapa hal lain yang tampak menjadi lebih penting dalam menentukan perilaku atau pilihan-pilihan politik daripada ideologi politik. Pembahasan bagian kedua ini ditujukan

untuk memperlihatkan perilaku memilih, baik masyarakat maupun elite atau partai politik, dalam kehidupan politik kontemporer.

DARI POLITIK ALIRAN MENUJU POLITIK KARTEL: PENJAJAKAN TIPOLOGISASI PARTAI

Studi budaya politik dalam ilmu politik diawali dengan munculnya pendekatan baru, yakni pendekatan tingkah laku (*behavioural approach*). Embrio pendekatan ini telah ada menjelang perang dunia kedua dan makin menguat pada tahun 1960-an. Pendekatan ini mengganti unit analisis ilmu politik dari yang berorientasi lembaga-lembaga formal dan juga dalam batas tertentu lembaga informal, menjadi individu atau aktor (Apter 1985: 330). Asumsi dasarnya ialah bahwa individu atau aktor politik adalah elemen yang sesungguhnya menentukan kondisi atau kualitas kehidupan politik, daripada lembaga-lembaga politik. Dalam sebuah negara yang memiliki lembaga-lembaga politik yang sama dapat saja menghasilkan situasi dan produk politik yang berbeda karena perilaku aktor politiknya berbeda.

Mengingat bahwa unit analisis dalam pendekatan tingkah laku adalah individu, pendekatan ini menyadari bahwa hal yang menentukan perilaku politik individu demikian kompleks, seperti status sosial, ekonomi, budaya, atau tingkat pendidikan individu tersebut. Kesadaran ini membangkitkan perhatian pada sebuah cara pandang yang lebih multidisipliner sehingga muncullah kemudian kajian-kajian turunan yang demikian penting, seperti ekonomi politik, psikologi politik, sosiologi politik, termasuk pula budaya politik. Bahkan kemudian, pendekatan tingkah laku tidak ragu menggunakan ilmu statistik dalam memotret perilaku politik masyarakat.

Dalam nuansa keilmuan seperti inilah kajian mengenai budaya politik menjadi berkembang, menghasilkan varian dan memunculkan banyak teori bernuansakan budaya politik. Hal ini termasuk studi Almond dan Verba berjudul *The Civic Culture* (1963), yang menjadi salah satu kajian klasik yang menggunakan pendekatan perilaku dan secara khusus mengkaji budaya politik di beberapa negara.

Perlu disampaikan di sini bahwa yang dimaksud sebagai budaya politik adalah seperangkat norma dasar yang dipandang sebagai sebuah kewajiban, dan menjadi pegangan dalam kehidupan berpolitik. Budaya politik merupakan bagian dari budaya itu sendiri, yang secara umum berarti kumpulan pengetahuan yang membentuk pola ciri tingkah laku kemasyarakatan, yang pada akhirnya menjadi kunci atas perilaku individu (Plano dkk.: 53–54). Beberapa pakar ilmu politik mengartikan budaya politik dalam sebuah definisi yang ringkas dan padat, yakni orientasi atau seperangkat cara berfikir sekelompok warga negara terhadap politik dan pemerintahan (Almond 1997: 41; Ranney 1993: 65). Adapun ideologi adalah seperangkat keyakinan yang dipengaruhi oleh budaya politik dan kemudian kerap memberikan pengaruh terhadap tuntunan berpikir dan berperilaku oleh sekelompok orang, partai atau negara dalam menganalisis sebuah fenomena politik dan menuntun penganutnya menuju sesuatu yang dianggap ideal. Adapun perilaku politik mengacu pada sebuah pola tingkah laku aktor-aktor politik baik yang didasari oleh budaya, ideologi, seperangkat norma maupun kepentingan politik dalam sebuah sistem politik.

Terkait dengan inti dari budaya politik pada akhirnya terkait dengan norma dan nilai-nilai dasar yang dijadikan pegangan aktivitas berpolitik, salah satu kajian yang cukup relevan dalam ranah budaya politik ini adalah kajian mengenai politik aliran. Kajian politik aliran memiliki asumsi dasar kuatnya pengaruh ideologi politik dalam menentukan perilaku politik seseorang termasuk perilaku memilih. Pembahasan politik aliran tidak dapat dilepaskan dalam sebuah batasan, yakni keyakinan dan tingkah laku politik yang dibentuk oleh latar belakang keyakinan ideologi maupun landasan primordial tertentu. Pandangan ini kerap melihat sektarianisme sebagai sesuatu yang “*given*” dan terkait dengan persoalan hegemonik, yakni sebagai sesuatu yang memengaruhi alam bawah sadar dan pada gilirannya turut menentukan preferensi politik.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, politik aliran yang berintikan ideologi politik itu kerap dikaitkan dengan sebuah komunitas besar tertentu yang mencakup banyak kalangan. Meski belakangan diyakini bahwa sektarianisme ini bersifat kon-

tekstual dan terikat oleh perkembangan zaman, namun secara umum tetap dipercaya oleh para penganutnya bahwa keberadaannya merupakan sesuatu yang relatif mengikat dan cenderung bersifat konstan. Atas dasar itulah paradigma sektarianisme kerap dipakai untuk menganalisis sebuah pemikiran atau perilaku politik kalangan tertentu hingga masa kini. Tidak mengherankan jika dalam beberapa episode politik di tanah air kajian semacam ini selalu hadir.

Demokrasi Liberal hingga Orde Baru

Pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru, salah satu karya besar yang berpengaruh, dalam kajian politik aliran adalah kajian Clifford Geertz dalam *magnum opus* nya *the Religion of Java* (Geertz 1960). Geertz membagi tipologi aliran dalam masyarakat Jawa yang mencerminkan ideologi politik mereka menjadi tiga, yakni santri, priyayi, dan *abangan*.

Menurut Geertz (1960) mereka yang cenderung masuk dalam kebudayaan santri berorientasi pada partai-partai Islam, seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), atau Partai Nahdatul Ulama (PNU). Adapun mereka yang berorientasi priyayi mempunyai kecenderungan kuat untuk memilih partai-partai nonagama yang kental bernuansa kejawaan dan “berbudaya tinggi”, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI). Adapun mereka yang termasuk dalam kategori *abangan* (merah) akan memiliki orientasi kepada partai nonagama dan berkarakter populis, seperti Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai), yang sangat menolak peran Agama Islam dalam segenap aspek kehidupan. Akibat pandangan ini, kaum *abangan* kerap juga terhubung atau bersimpati dengan gerakan komunis.

Teori ini dipandang mampu mengungkap tabir perilaku politik masyarakat. Belakangan skisma atau pembelahan politik model Geertz ini banyak menuai kritik. Salah satunya adalah karena dianggap mencampurkan sesuatu yang terlahir (*primordial*) dan yang tercapai atas bentukan sosiologis (*achievement*).

Hampir bersamaan dengan studi Geertz, Jay (1963) juga mengembangkan kajian mengenai budaya politik. Di sini dia melakukan pembela-

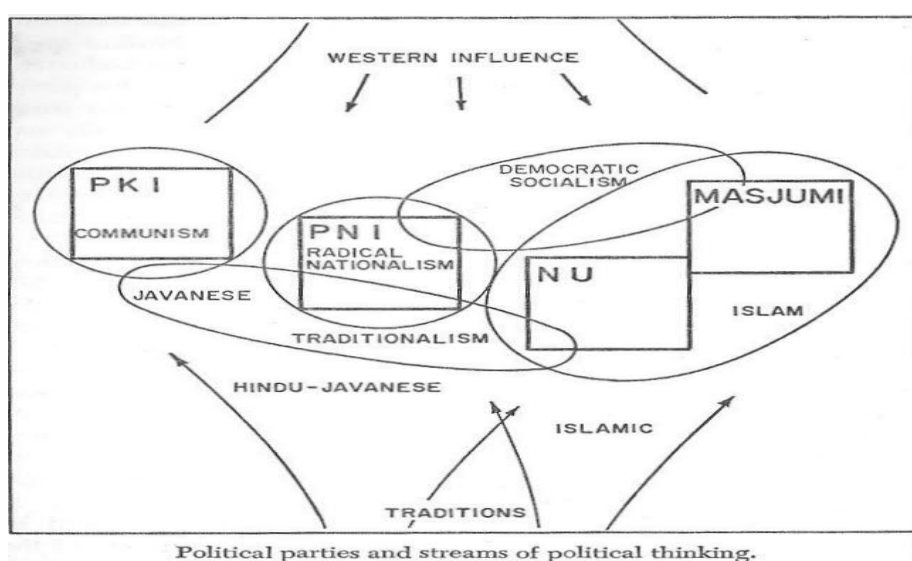
han kultur politik menjadi dua kelompok, yakni “ortodoksi” (santri) dan “sinkretis” (abangan). Kalangan ortodoksi merupakan kalangan yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Islam, sedangkan sinkretisme adalah mereka yang memadukan antara ajaran-ajaran Hindu-Budha dan Islam. Jay meyakini bahwa perkembangan politik Indonesia tak lain merupakan arena pertarungan antara kedua kelompok itu. Pertarungan dan konflik internal di dalam tubuh Sarekat Islam (SI), misalnya, dilukiskan oleh Jay sebagai pertarungan antara dua kelompok itu, yang tercermin antara SI-Putih dan SI-Merah. Dalam berbagai variannya kemudian terus berlangsung hingga Republik Indonesia ini berdiri.

Feith dan Castles (1970), beberapa tahun kemudian melanjutkan studi sejenis, namun dengan pendekatan yang lebih komprehensif, karena mengadopsi pengaruh norma-norma politik dari luar Indonesia, termasuk Barat. Mereka kemudian membagi aliran politik Indonesia menjadi lima, yakni nasionalis radikal/*radical nationalism* (PNI), tradisional Jawa/*Javanese traditionalism*, komunisme/*communism* (Partai Komunis Indonesia/PKI), Islam (Masyumi dan PNU), dan sosialisme demokrat/*democratic socialism* (Partai Sosialis Indonesia/PSI). Kelima aliran itu dipengaruhi oleh norma-norma yang ada baik yang berasal asli dari Indonesia (yakni budaya Hindu-Jawa dan Islam) maupun yang diadopsi dari Barat (lihat Gambar 1).

Kajian Feith dan Castles ini mengindikasikan fenomena politik aliran yang demikian mendominasi dan mewarnai hampir semua aspek kehidupan politik saat itu. Hidup matinya partai politik sedikit banyak ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Pembubaran Masyumi dan PSI di tahun 1960, misalnya, menjadi bukti bagaimana kerasnya pertarungan ideologi yang ada. Nuan-sa ideologis juga terlihat kental dengan adanya perdebatan mengenai landasan negara di Badan Konstituante antara partai-partai yang setuju negara berlandaskan nilai-nilai Islam (tergabung dalam Faksi Islam) dan negara berdasarkan Pancasila.

Di masa Orde Baru, kajian mengenai politik aliran tampak mulai menurun, sejalan dengan proyek deideologisasi dan deparpolisasi yang dilakukan oleh Orde Baru atas dasar paradigma *developmentalism*. Asumsi yang dibangun oleh Rezim Soeharto itu adalah, dibutuhkan akselerasi ekonomi sebagai jawaban atas kemunduran kehidupan bangsa. Adapun kunci sukses untuk melakukan akselerasi itu adalah menciptakan sebuah stabilitas politik. Sayangnya, stabilitas politik itu diterjemahkan bukan sebagai sebuah pemantapan sistem politik demokrasi, namun justru mengarah pada penguatan sistem politik otoriter.

Dalam pemaknaan stabilitas politik seperti itulah diterapkan seperangkat paket penataan politik, termasuk di dalamnya penyederhanaan



Sumber: Feith dan Castles (1970: 14).

Gambar 1. Kategorisasi Partai Menurut Feith dan Castles

partai, konsep massa mengambang (*floating mass*), deparpolisasi (fusi parpol), ideologisasi, dan penetapan asas tunggal. Dampaknya adalah partai secara ideologis dapat eksis, namun tanpa jatidiri. Pasca 1985, saat asas tunggal dikukuhkan, jati diri ideologi partai-partai punah.

Era Reformasi

Di era Reformasi, liberalisasi politik membawa situasi baru yang lebih kondusif bagi eksperimentasi ideologi dalam ranah politik. Di awal Reformasi, eksperimentasi ideologi dicoba untuk dibangkitkan kembali. Dengan membawa romantisme ideologi politik atau politik aliran ala demokrasi liberal muncullah beberapa partai yang mencoba mengaitkan diri dengan partai-partai besar dari masa lampau, dan menggunakan basis politik ideologis sebagai modal politiknya. Dalam ranah PNI, misalnya, muncul partai-partai seperti PNI Masa Marhaen, PNI-Supeni, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagai “kelanjutan” Masyumi hadir misalnya Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Politik Islam Masyumi (PPI Masyumi). Adapun dari kelompok NU muncul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdatul Umat (PNU), dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (PSUNI). Partai-partai tersebut menggunakan simbol-simbol yang mirip atau hampir mirip dengan partai pendahulunya.

Banyak kalangan dengan berbasiskan ideologi atau budaya politik yang kemudian menaruh perhatian pada tipologi partai-partai politik di era Reformasi. Di antara yang cukup menonjol adalah pembagian dari Dhakidae (1999: 1–40), yang membagi tipologi partai menjadi dua sumbu, yaitu (i) sumbu vertikal, yaitu partai yang berorientasi agama *versus* kebangsaan; dan (ii) sumbu horizontal yang terbagi antara kutub sosialisme *versus* pembangunanisme. Adanya sumbu horizontal ini untuk menunjukkan pengakuan akan adanya varian di masing-masing kelompok partai, baik atas dasar agama maupun kebangsaan. Di dalam kedua kelompok itu diasumsikan ada kelompok yang cenderung pro-sosialis dengan orientasi pemerataan dan dekat-dengan ide-ide kiri dan kerakyatan; dan kelompok yang cenderung

pro-pembangunanisme yang sepakat dengan ide percepatan ekonomi.

Pembagian Dhakidae meski tampak memodifikasi tipologi politik aliran terutama untuk menampung variasi yang ada di antara kalangan kebangsaan dan agama, sedikit banyak menunjukkan keyakinan akan masih kuatnya pengaruh ideologi di kebanyakan partai-partai utama yang ada. Pandangan ini tampak sejalan dengan kecenderungan opini banyak kalangan tentang bangkitnya kembali politik aliran, terutama dalam konteks elektoral, selepas Orde Baru. Tuntutan-tuntutan yang berkesan “sektarian” memang terbukti belakangan muncul pasca-pemilu.

Hampir sejalan dengan Dhakidae, Evans (2003) muncul dengan sebuah ide kategorisasi partai-partai berdasarkan nuansa ideologinya. Berbeda dengan Dhakidae, Evans (2003: 10) membagi kategori partai ke dalam dua sumbu utama, yaitu sumbu horizontal yang berintikan pembelahan atas dasar “kiri dan kanan”, namun bukan atas dasar sosialis versus kapitalis, melainkan antara partai berorientasi sekuler versus Islam. Adapun pada sumbu vertikal atau “atas-bawah”, menurut Evans adalah orientasi budaya politik, antara mereka yang cenderung elitis yang ditandai dengan sikap mereka yang berorientasi proses daripada mengidentifikasikan diri pada pemimpin partai, dan menilai pemimpin mereka secara objektif terutama atas kebijakan yang mereka buat; dengan mereka yang dikategorikan sebagai populis, di mana pola hubungan yang terbangun antara partai terutama elite dengan masyarakat cenderung bernuansakan simbolik dan bersifat emosional bahkan mistis.

Terkait dengan sumbu horizontal, partai-partai nasionalis sekuler seperti PDIP berada pada posisi paling kiri, sementara partai-partai seperti PBB dan PPP masuk dalam kategori Islamis dan ditempatkan pada posisi paling kanan. Sementara di antara kedua kelompok partai ini terdapat partai lain yakni Golongan Karya, PKB, dan PAN. Dalam konteks sumbu vertikal, Golkar dan PAN dianggap lebih “rasional” sehingga diletakkan lebih ke atas. Sementara PDIP dan PKB dianggap lebih populis sehingga diletakkan agak ke bawah. Adapun PBB dan PPP diletakkan Evans di antara partai-partai itu. Tipologisasi yang memotret

partai-partai yang tumbuh dan berkembang dalam periode 1998–1999 menunjukkan sekali lagi keyakinan masih kuatnya peran ideologi politik dalam konstelasi politik nasional.

Dalam perspektif yang kurang lebih sama, Ufen (2005) juga membuat kategorisasi partai dengan titik berat pada ideologi politik. Meski demikian, Ufen memasukkan unsur “non-ideologis” dalam kategorisasi partai yang dibuatnya. Di sini ia memasukkan kategori kecenderungan orientasi politik dalam sumbu vertikal yang di-belah antara mereka yang cenderung konservatif, atau anti-perubahan, bersifat lambat merespons perubahan, pro-elite dan cenderung memelihara *status-quo*, dengan mereka yang berkarakter reformis, yang pro-perubahan atau progresif. Hasilnya adalah Golkar dianggap paling konservatif di antara semua partai, disusul dengan PPP dan PBB, sedangkan PAN ditempatkan sebagai partai paling reformis.

Pada sumbu horizontal, pembelahan masih bersifat klasik, yaitu antara kelompok yang berorientasi sekuler dengan mereka yang berorientasi Islam. Namun, Ufen membagi lagi kelompok Islam ini antara kelompok yang cenderung Islamik (yaitu mereka yang menekankan substansi), dengan mereka yang Islamis (yang menekankan pendekatan formal). PKB masuk dalam kategori Islamik, sedangkan PBB dan Partai Keadilan (PK) masuk dalam kategori Islamis, adapun PAN dan PPP berada di antara keduanya.

Pembagian tipe-tipe partai yang dilakukan oleh Dhakidae, Evans dan Ufen tersebut di atas, belakangan memunculkan kontroversi, keberatan dan bahkan perbedaan dalam menempatkan beberapa partai pada posisi-posisi yang kontradiksi. Namun, terlepas dari hal-hal tersebut, ketiganya tampak sepakat bahwa ideologi politik memainkan peran yang penting dalam mengatur cara pandang dan perilaku partai. Dalam hal ini, kajian ketiganya atas partai-partai yang tumbuh di sekitar tahun 1998–1999 dan turut serta dalam Pemilu 1999, tampak masih meyakini adanya peran yang signifikan dari ideologi politik dalam kehidupan politik bangsa.

Politik Kartel dan “*The End of Ideology*”

Hasil kajian Ambardi (2009) tentang perilaku partai sejak awal reformasi hingga kini berujung pada sebuah kesimpulan yang mematahkan asumsi kuatnya peran ideologi politik. Alih-alih digerakkan oleh kepentingan ideologi, dalam menjalankan aksinya, partai-partai sesungguhnya lebih digerakkan oleh upaya untuk bertahan hidup dan kepentingan untuk terus berada dalam arus kekuasaan, dengan menggunakan cara-cara yang pragmatis, yang untuk itu bahkan rela melakukan “migrasi ideologi” atau perpindahan sikap ideologis sekalipun. Ambardi kemudian menyimpulkan fenomena itu sebagai kartel politik.

Sudut pandang Katz dan Mair (1994; 1996), serta Ambardi (2009: 28) menunjukkan lima karakter sistem kepartaian yang terkartelisasi, yaitu:

- 1) Ideologi sebagai sesuatu yang tidak penting dalam menentukan perilaku partai.
- 2) Partai-partai bersikap permisif atau serba boleh (*promiscuous*) dalam membentuk koalisi.
- 3) Oposisi cenderung menjadi tidak ada atau tidak dapat diidentifikasi karena bercampur-baur dengan pemerintah.
- 4) Hasil-hasil pemilu memberikan dampak minimal atau bahkan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perilaku partai-partai.
- 5) Partai-partai, baik yang ada dalam pemerintahan atau tidak, cenderung berafiliasi menjadi satu kelompok besar dalam menangani isu-isu kebijakan yang berkembang.

Ambardi beranggapan bahwa peran ideologi dalam kehidupan politik cenderung terhenti pada proses elektoral saja. Beberapa partai pada masa-masa menjelang pemilihan menunjukkan kecenderungan dan geliat pergerakan yang menjadikan ideologi sebagai patokan kebijakan dan manuver politiknya. Simbolisasi sebagai penerus partai dari masa lalu demikian ditonjolkan, namun nuansa ideologis terhenti seketika menjelang pembentukan kabinet. Kenyataannya, setelah Abdurrahman Wahid, yang disapa Gus Dur (dari PKB), menjabat sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri (dari PDIP) sebagai wakil presiden, maka seluruh partai besar dan menengah, bahkan

beberapa partai kecil, yang berasal dari lintas ideologi menjadi bagian dari anggotanya tanpa terkecuali.¹

Inilah yang kemudian disebut sebagai koalisi *turah* (*grand coalition*), yang bersifat lintas ideologi, dan menjadi ciri politik kartel. Kemudian terlihat bahwa agenda dan program partai-partai menjadi tersingkirkan, digantikan oleh “kepentingan dadakan yang kolektif” yang dikelola kemudian secara kolektif pula sebagai satu “kelompok besar”. Situasi ini jelas tidak dapat terjawab oleh pendekatan ideologis yang dikembangkan oleh para pakar politik sebelumnya.

Ambardi (2009) berpendapat bahwa penyebab ini semua terkait dengan upaya partai-partai untuk melanjutkan keberlangsungan hidup mereka, melalui rente dari segenap jabatan negara yang ada. Upaya pemenuhan kepentingan pragmatis itu kerap bersifat *trade off* dengan upaya pencapaian kepentingan ideologis. Artinya, karena partai secara *inheren* tidak mampu membiayai dirinya, maka upaya perburuan rente menjadi pilihan yang tidak terelakkan dan pada akhirnya lebih diutamakan daripada perjuangan ideologis. Ambardi secara jelas menyimpulkan:

*“... kepentingan finansial yang bersifat kolektif adalah alasan utama partai-partai untuk bertindak sebagai satu kelompok dan hanya mengabdikan pada kepentingan kelompok itu sendiri. Kepentingan kolektif ini menjadikan mereka melihat jabatan menteri dan jabatan ketua DPR sebagai gerbang utama untuk mendapatkan rente-bukan untuk mengusung kepentingan ideologis dan programatik ... Kebutuhan partai-partai akan rente- untuk kelangsungan hidup kolektif mereka- merupakan kepentingan bersama. Dengan demikian, kepentingan bersama ini **menyingkirkan komitmen ideologi** (huruf tebal dari penulis) dan agenda program mereka”* (2009: 344–345)

Kesimpulan Ambardi ini bersinergi dengan kenyataan pada tataran masyarakat yang semakin

pragmatis dalam berpolitik, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya di awal tulisan melalui cuplikan pandangan Mujani dan Liddle. Sinergisitas antara perilaku partai dan masyarakat ini berujung pada kondisi yang tentu saja menyebabkan aspek-aspek ideologi politik menjadi cenderung terlihat semakin tidak menentukan lagi. Pembahasan di bawah ini menelaah aspek empiris melalui beberapa momen politik penting yang terjadi selama kurun waktu 14 tahun reformasi, mengenai tersingkirnya ideologi dalam kehidupan politik.

MENURUNNYA PERAN IDEOLOGI POLITIK: DARI VOLATILITAS HINGGA UTILITARIANISME

Di era Reformasi peran politik aliran atau ideologi politik sulit untuk dikatakan telah lenyap. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ideologi politik memainkan peran yang signifikan dalam menuntun perilaku politik, baik dalam tingkat internal partai atau dalam hubungannya dengan konstituen.

Pembentukan beberapa partai di awal Reformasi, misalnya, tampak memunculkan kembali kenangan politik aliran tahun 1950-an. Beberapa partai didirikan oleh tokoh-tokoh yang masih terikat dengan partai-partai masa lalu. PBB misalnya dibentuk oleh Keluarga Bulan Bintang (KBB) yang merupakan perkumpulan eksponen Masyumi,² yang kemudian bersepakat mendirikan partai itu di tahun 1998 (Amir 2003: 59–67). Partai ini dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra yang kerap disebut sebagai “anak emas” Moh. Natsir, Ketua Umum Masyumi terlama di tahun 1950-an.

Begitu pula dengan keberadaan beberapa partai lain, seperti PNI-Supeni/PNI-Marhaenisme yang didirikan oleh Supeni dan mengklaim sebagai kelanjutan dari PNI yang didirikan oleh Bung Karno. PKB pun yang didirikan oleh anak dari mantan ketua Partai NU Wahid Hasyim dalam

1 Hampir seluruh tokoh utama partai masuk dalam Kabinet Persatuan Nasional, di antaranya, Jusuf Kalla/Memperindag (Golkar), Kwik Kian Gie/Menkoekuin (PDIP), Hamzah Haz/Menkokesra (PPP), Bambang Sudibyo/Menkeu (PAN), Yusril Ihza Mahendra/Menhukdang (PBB), Nur Mahmudi Ismail/Menhut (PK), Ryaas Rasyid/Menegotda (PDK), termasuk yang belakangan membentuk partai sendiri seperti Wiranto/Menkopolkam dan Soesilo B. Yudhoyono/Mentamben.

2 Keluarga Bulan Bintang adalah wadah silaturahmi yang dibentuk oleh tokoh dan simpatisan Partai Masyumi setelah partai ini membubarkan diri di tahun 1960, di bawah ancaman Rezim Soekarno yang akan membubarkan partai itu jika tidak segera membubarkan diri. Masyumi memilih cara terhormat dengan membubarkan diri daripada dilecehkan dengan dibubarkan oleh penguasa saat itu.

batas-batas tertentu bersikeras menyatakan diri sebagai pelanjut sah dari perjuangan NU, yang berarti tidak menafikan kelanjutan perjuangan Partai NU. Komunikasi politik yang dikembangkan oleh partai-partai, dengan menggunakan idiom dan logika berpikir yang sarat dengan nilai-nilai politik seperti Islam modernis untuk PBB, Nasionalis Radikal untuk PNI-Supeni ataupun Islam tradisional untuk PKB, cukup terasa.

Kesan kentalnya nuansa ideologi politik juga muncul dengan terbentuknya Poros Tengah sesaat menjelang pemilihan presiden oleh MPR tahun 1999. Poros Tengah adalah kelompok yang terdiri dari partai-partai Islam di parlemen di antaranya PPP, PAN, PK, PSII, PKU, dan PNU. Poros tengah ini bertujuan untuk menjadi kekuatan alternatif antara Partai Golkar, yang saat itu masih kuat dikesankan sebagai pelanjut Soeharto dengan PDIP dan kelompok nasionalis di belakangnya.

Komposisi partai dan anggota parlemen mengakomodir kelompok atau figur-figur non-muslim, dan poros ini menaruh kewaspadaan dengan manuver politik dan tampak berkeberatan jika Megawati dan PDIP dapat ke puncak pimpinan negeri ini. Megawati saat itu dipersepsikan sebagai “ancaman imajinatif” bagi kelompok Islam (Suharsono 1999: 89). Meski demikian, pascaproses pembentukannya, poros ini bergerak dengan amat fleksibel, yang pada akhirnya sukses menggandeng kekuatan besar dalam MPR termasuk kekuatan sekuler, seperti Golkar dan TNI/Polri.

Peran ideologi politik juga tercermin dari upaya ormas-ormas Islam dan dua partai Islam, yaitu PPP dan PBB, untuk memasukkan tujuh kata, yaitu *kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya*, sebagaimana yang ada dalam Piagam Jakarta, ke dalam Pasal 29 (1) UUD 1945. Kedua partai itu, dengan sokongan beberapa ormas Islam³ menggunakan ajang Sidang Tahunan MPR tahun 2000 untuk

menyuarakan kepentingannya (Basalim 2002). Meski tampak sadar akan minimnya dukungan fraksi lain dalam MPR, kedua partai tersebut, dengan dorongan ideologi yang kental, tetap berupaya memperjuangkan perubahan Pasal 29 (1) UUD 1945 itu. Hal mana terbukti kemudian gagal karena ditolak oleh mayoritas fraksi pada pembahasan di Badan Pekerja MPR.

Terlepas dari masih berperannya ideologi politik, beberapa kasus penting lain dalam dunia politik justru menunjukkan semakin minim peran yang dimainkannya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari kasus (i) pemilu legislatif, (ii) pemilihan presiden, (iii) pembentukan koalisi, (iv) karakter pemerintahan, dan (v) pilkada.

Pemilu Legislatif

Dalam konteks pemilu legislatif, masyarakat didekati oleh partai-partai yang ada saat ini yang lazim menggunakan pendekatan yang bersifat pragmatis. Simbol-simbol ideologis tetap ada, namun sudah semakin minim. Sistem proporsional terbuka yang mengharuskan kandidat untuk mendekati masyarakat secara langsung, makin menguatkan kenyataan ini. Banyak calon legislatif (caleg) yang menyadari bahwa mereka kurang dikenal kemudian menggunakan cara cepat untuk dapat terkenal dan menarik perhatian masyarakat. Misalnya, memberikan sesuatu yang konkret kepada masyarakat, seperti pemberian kebutuhan bahan pokok, melakukan kegiatan sosial yang sifatnya gratis, pembagian hadiah melalui kegiatan amal atau kompetisi olah raga, mengadakan pertunjukan hiburan rakyat, bahkan ada pula yang langsung memberikan uang kepada masyarakat.

Dalam beberapa kasus pertunjukan hiburan rakyat, yang biasanya menghadirkan penyanyi dangdut dan pelawak, menjadi ajang “bagi-bagi” uang. Pola pendekatan seperti itu, dapat menyebabkan nuansa politik uang demikian menggejala. Beberapa lembaga seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW), misalnya, mencatat bahwa pada Pemilu 2009, caleg merupakan aktor utama (82%) dari pelaku politik uang dalam pengertian membeli suara (*vote buying*) (Husein 2012).

Meski partai secara formal telah mengingatkan agar para caleg dapat menjaga pendekatan

3 Di antaranya Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Front Pembela Islam (FPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

pragmatis yang berlebihan, namun tidak semua caleg mematuhi. Salah seorang caleg yang berhasil diwawancara menjelang pemilu mengaku bahwa meski hal itu berarti melanggar aturan partai, dia tidak dapat mengelak melakukan kegiatan semacam pembagian sembako. Hal ini karena menurutnya masyarakat tampak berharap bahwa para caleg dapat memberikan sesuatu yang konkret, tidak sekadar janji, kepada mereka (Wawancara dengan SBS seorang Caleg DPRD dari Partai Demokrat, di Surabaya, 30 Maret 2009).

Caleg yang ingin segera dikenal juga kerap mengandalkan figur tertentu yang masih terhitung keluarga, dan ini yang cukup banyak, memanfaatkan kepopuleran tokoh-tokoh nasional, mulai dari artis hingga pahlawan nasional, untuk menarik perhatian masyarakat (Noor 2009). Di banyak spanduk atau stiker mereka menyertakan gambar tokoh yang dirasakan akan membawa banyak perhatian khalayak.

Ketidakpedulian untuk mengedepankan nilai-nilai ideologis menjadi menggejala, juga sebagai cerminan dari lemahnya pemahaman caleg mengenai ideologi partai yang dianutnya. Hasil penelitian Pusat Kajian Politik (Puskapol) menunjukkan bahwa kader-kader partai kerap tidak memahami ideologi yang dimiliki oleh partainya. Disebutkan oleh Puskapol bahwa;

“... Studi lanjutan ini juga menemukan indikasi bahwa pengurus partai sendiri nampak kebingungan dalam merumuskan ideologi partai dan terjemahannya dalam aktifitas partai sehari-hari” (Hidayat 2008: 12).

Hal ini menjadi wajar mengingat bahwa aspek internalisasi ideologi melalui kaderisasi menjadi sesuatu yang pada umumnya terbengkalai dalam kehidupan partai-partai (Haris 2004). Hanya sedikit partai yang memang benar-benar menjalankan kaderisasi dan sosialisasi ideologi dan menjadikannya sebagai kredit bagi kader untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi (Muchlis 2007; Romli 2008). Kenyataannya, kenaikan jenjang itu kerap ditentukan oleh hal lain di luar pemahaman mereka terhadap ideologi dan komitmen untuk melaksanakannya.

Di sisi lain, pengedepanan ideologi menjadi semakin jarang terjadi, mengingat masyarakat memang juga semakin pragmatis atau tidak

mempedulikan hal itu. Hasil kajian Mujani dan Liddle (2010) sekali lagi dapat dilihat sebagai pembuktian dari tren perilaku politik yang digerakkan oleh hal-hal di luar ideologi.

Saat ini masyarakat cenderung tidak tabu lagi untuk mengaitkan kemampuan seorang politisi yang memberikan hasil konkret—terutama berupa pembangunan fisik di suatu wilayah, pada saat menjelang pemilu—dengan kelayakan untuk dipilih. Menurut salah seorang responden, bagi masyarakat di tingkat bawah, saat ini yang terpenting adalah para politisi itu dapat memberikan sesuatu kepada rakyat terlepas apapun benderanya (Wawancara dengan narasumber J, 26 Desember 2013, di Depok).

Sikap ini tampak sejajar dengan pandangan masyarakat terhadap politik, yang kerap menjadi semakin sederhana dan tidak menunjukkan sesuatu yang pantas untuk dihormati. Dalam konteks Indonesia saat ini situasi tersebut terlihat, misalnya, dari maraknya spanduk-spanduk bernuansakan oportunisme yang bertuliskan *“Ada uang ada suara. Menerima Serangan Fajar”* (<http://politik.news.viva.co.id/news/read/452798>), *“Ada uang ada suara. Siap Menerima Serangan Fajar”* ([Tribunsumsel.com/Tommy Sahara](http://tribunsumsel.com/Tommy%20Sahara)) atau *“Tanpa uang jangan datang. Kami Siap Menerima Serangan Fajar”*, yang tertulis pada sebuah spanduk di Desa Nagaela di wilayah Kabupaten Barito Timur (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/29>).

Cerminan dari tidak bekerjanya ideologi juga terlihat dari rendahnya loyalitas masyarakat kepada partai, sementara volatilitas (ketidakloyalan) kepada partai demikian tinggi. Tercermin dari fluktuasi perolehan suara partai-partai yang cukup tinggi antara satu pemilu ke pemilu lain (Noor 2013). Menurut Kacung Maridjan, adanya ideologisasi yang benar akan menyebabkan tumbuhnya loyalitas dalam berpolitik. Orang tidak akan mudah dimobilisasi atau berpindah partai karena ada ikatan ideologis yang kuat terhadap partainya (Wawancara dengan Kacung Maridjan, di Jakarta, 26 November 2010). Sayangnya, ideologisasi itu tidak berjalan di kebanyakan partai, seiring dengan tersendatnya proses kaderisasi.

Volatilitas tinggi ini kemudian kurang memotivasi partai-partai untuk bekerja lebih keras

lagi. Alih-alih bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka cenderung semakin menahan diri, untuk kemudian mendekati masyarakat tepat di detik-detik akhir menjelang pencoblosan melalui serangan fajar. Sikap ini justru pada gilirannya menyuburkan pragmatisme dan yang terpenting ketidakdekatan masyarakat pada partai, yang pada akhirnya makin menguatkan volatilitas. Lingkaran setan pun tidak dapat dihindari.

Pemilihan Presiden

Pada kasus pemilihan presiden (pilpres), ketersingkirkan ideologi juga terlihat. Dalam tiga kali pelaksanaan pemilu, nuansa percampuran atau migrasi ideologi menjadi semakin kental terasa. Meski pada pemilihan presiden tahun 1999, melalui mekanisme sidang MPR, nuansa ideologis itu masih cukup terasa, namun pada saat pilpres langsung situasi ideologi tampak semakin cair.

Bagi sebagian kalangan, situasi ini dapat dilihat sebagai sebuah kedewasaan politik. Namun, bagi kalangan lain kondisi ini merupakan bukti dari ketersingkirkan ideologi. Ketersingkirkan ideologi dilihat dari dua tingkat, yaitu tingkat partai dan tingkat masyarakat. Termasuk dalam tingkat partai adalah kesepakatan politik yang diambil hanya dengan melibatkan unsur-unsur partai. Adapun dalam konteks masyarakat, berhubungan dengan bagaimana masyarakat menyikapi dan berperilaku dalam kontestasi politik di ajang pilpres ini.

Pada Pilpres 1999, Gus Dur yang didukung oleh beberapa fraksi, yakni Fraksi Reformasi

(PAN dan PK), Fraksi PPP, Fraksi Daulat Umat (PNU, PKU, PP, PSII, Masyumi), sebagian Fraksi Utusan Golongan, sebagian Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Golkar serta belakangan Fraksi Kebangkitan Bangsa meraih suara 373 suara. Adapun Megawati yang didukung oleh Fraksi PDIP dan Fraksi PDKB, sebagian Fraksi Utusan Golongan dan sebagian Fraksi TNI/Polri meraih 313 suara. Dari elemen-elemen pendukung Wahid terlihat adanya nuansa lintas ideologi yang kentara, di mana Partai Golkar akhirnya bersedia bergabung ke dalam barisan partai-partai Islam. Dapat dikatakan di sinilah salah satu momen yang menandai munculnya fleksibilitas ideologi dalam konstelasi politik nasional era reformasi.

Pada Pilpres 2004 situasi “percampuran ideologi” terulang kembali, bahkan kali ini dengan nuansa pragmatisme yang jauh lebih kentara. Pada pilpres tersebut, baik kekuatan sekuler dan Islam sama-sama terpecah, yang tercermin dari munculnya beberapa kandidat presiden dari masing-masing kubu. Tidak saja demikian, hampir semua kandidat berupaya mengakomodir atau mengombinasikan kedua unsur aliran, Islam dan Kebangsaan, yang tercermin terutama dari komposisi presiden dan wakil presiden, yakni Megawati-K.H. Hasyim Muzadi, Wiranto-K.H. Salahudin Wahid, Amien Rais-Siswono Y.H., Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dari semua kandidat praktis hanya pasangan Susilo B. Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) saja yang tidak mengombinasikan kedua unsur itu, namun melibatkannya di tingkat dukungan partai dan proyeksi kabinet.

Tabel 1. Kondisi Hipotetis dan Riil Pengelompokan Partai Pada Pilpres 2004

Kondisi	Kandidat Presiden	Partai Pendukung
Putaran Pertama	Megawati (TS)	<i>PDIP + PDS</i>
	Wiranto (TS)	<i>Golkar + PKB</i>
	Amien Rais (TI)	<i>PAN + PKS + PBR + PNBK + PNIM + PPDI + PSI + PBSO</i>
	Susilo B Yudhoyono (TS)	<i>PD + PBB + PKPI</i>
	Hamzah Haz (TI)	<i>PPP</i>
Putaran Kedua	Megawati (TS)	<i>PDIP + Golkar + PPP + PBR + PDS</i>
	Susilo B Yudhoyono (TS)	<i>PD + PBB + PKPI + PKS</i>

Sumber: Ambardi (2009: 252). Dan www.kpu.or.id

Catatan: Penulisan dengan italic menunjukkan partai sekuler

Tabel 1 menunjukkan komposisi dukungan partai-partai atas kandidat presiden. Pada putaran pertama terlihat bahwa hanya Megawati (sekuler) dan Hamzah Haz (Islam) yang didukung secara disiplin oleh partai-partai yang satu aliran. Adapun kandidat lain didukung oleh lintas aliran. Namun, perlu diperhatikan bahwa baik Megawati maupun Hamzah Haz juga mengakomodir kepentingan aliran lain dalam kursi wakil presiden dengan menempatkan Hasyim (Islam) dan Agum (sekuler) sebagai wakil presiden mereka.

Kecairan ideologi justru tampak demikian kuat pada putaran kedua, di mana baik pasangan Mega-Muzadi atau SBY-JK sama-sama didukung oleh partai-partai dari semua aliran yang ada. Situasi ini makin menunjukkan bahwa secara konkret sekat-sekat politik aliran tampak sudah tidak bermakna lagi, yang menunjukkan pula menguatnya peran pragmatisme dalam berpolitik.

Pemilu Presiden 2009 juga tidak menunjukkan situasi yang berbeda secara signifikan. Pada pilpres ini memang ada kesan konsistensi, di mana tokoh-tokoh sekuler didukung oleh partai-partai yang sehaluan. Pun tidak ada sebuah konsesi pada posisi wakil presiden terhadap kelompok yang beraliran berbeda. Dari tiga pasangan kandidat semuanya berasal dari partai (atau tokoh independen) yang berhaluan sekuler, yakni Megawati-Prabowo S., SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Mega-Prabowo didukung oleh dua partai beraliran nasionalis, yakni PDIP dan Gerindra. SBY-Boediono didukung oleh PD, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Adapun JK-Wiranto didukung oleh Golkar dan Hanura. Dalam kontestasi saat itu praktis hanya pasangan SBY-Boediono yang didukung oleh partai-partai menengah dan besar lintas ideologi.

Jika dicermati lebih dalam, menyatunya partai-partai sehaluan, dalam hal ini dari kubu sekuler, bukan termotivasi oleh kepentingan ideologi politik semata, melainkan lebih karena konsesi atau posisi tawar politik yang didapatkan. Kesediaan Prabowo untuk menjadi wapres Megawati berlangsung alot dan diselesaikan setelah ada kesepakatan “bagi hasil” yang bersifat *win-win solution* di antara mereka mengenai komposisi kabinet. Konsekuensinya, Gerindra harus mendukung pasangan ini. Begitu pula yang terjadi dengan JK dan Wiranto, yang menyebabkan Ha-

nura harus turut serta dalam gerbong pendukung pasangan itu.

Persoalan kalkulasi atau transaksi politik itu juga yang menyebabkan dukungan partai-partai Islam diarahkan kepada pasangan SBY-Boediono. Meski demikian, memang ada pula beberapa perjanjian di belakang layar yang bersifat ideologis, terutama antara SBY dan PKS. Namun, tanpa sebelumnya berupaya melakukan peleburan *platform* apalagi ideologi, terbentuklah sebuah pengelompokan pendukung yang cair, yang belakangan menimbulkan problem di kemudian hari. Akibat ketidaksamaan ideologi, cara pandang dan visi politik itu di antara partai-partai pendukung koalisi Pemerintahan SBY, kerap terjadi perbedaan dalam melihat sebuah persoalan yang menimbulkan gesekan antara presiden dengan beberapa partai pendukung koalisi.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa konsesi politik sebagai turunan dari pragmatisme jangka pendek yang kerap tidak terkait dengan kepentingan ideologis menjadi sebuah tren pada pemilu presiden, terutama pasca Pilpres 1999. Uniknyanya, sikap pragmatisme ini tidak saja ditunjukkan oleh elite politik dan partai-partai, namun juga oleh masyarakat.

“Keterpenjaraan” budaya politik atau ideologi politik tampak hampir tidak terjadi. Kesimpulan Mujani dan Liddle tampak tepat, mengingat faktor-faktor yang bersifat praktis termasuk *track record* dan kemampuan memimpin pemerintahan menjadi landasan perilaku memilih masyarakat. Penguatan pengaruh aspek-aspek non-ideologis tercermin juga dari lemahnya ikatan ideologis yang menyebabkan muncul semacam “dualisme pemilihan” antara memilih partai dengan memilih kandidat presiden.

Pada Pilpres 2004, misalnya, tidak seluruh pemilih PDIP memilih Megawati. Menurut data *International Foundation for Electoral System* (IFES) yang dikutip oleh Tan (2006) hanya 59,2% dari pemilih PDIP yang kemudian memilih Megawati. Hal ini menunjukkan bahwa faktor figuritas menjadi lebih penting daripada partai, apalagi ideologi politik. Pemilih SBY tersebut seolah mengabaikan kekecewaan Mega atas SBY yang telah dianggap mengkhianatinya dengan maju sebagai kandidat presiden.

Ideologi yang tidak berjalan juga tercermin dari kekalahan pasangan Mega-Hasyim di Kota Surabaya yang selama ini merupakan “kantong ideologis” NU sekaligus PDIP. Dari 31 kecamatan yang ada, pasangan tersebut hanya menang di tujuh kecamatan saja. Situasi di mana adanya peralihan suara juga terjadi dengan pemilih Golkar dan PPP. Mayoritas pemilih Golkar (39,1%) memilih SBY pada saat pilpres. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemilih yang kemudian memilih Wiranto (38,4%). Adapun untuk PPP, sebanyak 39,4% pemilih partai Islam ini, memilih SBY yang notabene bukan tokoh Islam, dan hanya 26,3% saja yang memilih Hamzah Haz. Situasi yang sama juga terjadi pada PBB di mana 48,6% pemilihnya cenderung memilih SBY daripada tokoh lain, termasuk capres yang diidentikkan dengan kalangan Islam (Tan 2006: 102).

Sikap masyarakat yang tidak lagi dituntun oleh politik aliran dalam melakukan pilihan politik telah menumbuhkan konstelasi politik yang khas. Kekalahan pasangan Mega-Hasyim menunjukkan bahwa simbolisasi “putri Soekarno” berikut ajaran Marhaenisme dan kedudukan khas kyai pada masyarakat santri berikut budaya politik NU tidak terlalu berhasil. Demikian pula dengan kekalahan pasangan lainnya, seperti Wiranto-Solahuddin, Amien Rais-Siswono, dan Hamzah Haz-Agum yang dianggap merupakan figur-figur yang mewakili basis ideologi atau kultur politik tertentu, seperti Muhammadiyah, NU, atau kebangsaan, menunjukkan eksistensi politik aliran yang terabaikan. Sementara SBY-JK yang kurang mewakili simbol-simbol politik aliran justru keluar sebagai pemenangnya.

Pada Pilpres 2009, fenomena ketidakloyalan atau dualisme dalam memilih terlihat dengan jelas. Hal ini dapat terlihat dari keberhasilan pasangan SBY-Boediono meraih kursi hingga 60,8%, padahal Partai Demokrat (PD) hanya mendapatkan sekitar 20% kursi saja. Gabungan partai yang mendukungnya secara kalkulatif pun hanya sekitar 45% saja. Dengan kondisi tersebut terlihat jelas adanya “migrasi suara” dari kantong-kantong PDIP ataupun Golkar.

Pasangan SBY-Boediono menang di hampir semua provinsi yang ada, bahkan di Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara yang

merupakan basis PDIP. Di Jawa Tengah pasangan ini bahkan mampu menguasai wilayah seperti Solo dan Blitar yang secara tradisi merupakan “kandang banteng”. SBY mampu secara meyakinkan menguasai Jawa Timur, termasuk untuk kedua kalinya di Surabaya. Sementara perolehan suara peringkat ketiga JK-Wiranto hanya memperoleh 12,41% saja. Padahal, gabungan suara Golkar dan Hanura dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) mampu meraih suara hingga 18,3%; artinya pasangan ini mengalami defisit sekitar enam persen.

Pembentukan Koalisi

Politik aliran tidak menjadi pegangan bahkan di saat pembentukan koalisi pemerintah pun. Masing-masing pihak yang menentukan untuk bergabung pada sebuah koalisi lebih dituntun oleh kalkulasi pragmatis, yaitu *pertama*, probabilitas menjadi pemenang atas dasar hasil pemilihan, dan *kedua*, kompensasi yang akan didapatkan pascadukungan dalam pilpres. Pada soal yang pertama itulah kemudian muncul kritik atas model pilpres setelah pileg, yang cenderung menyuburkan praktik dagang sapi (*horse trading*). Dengan situasi ini tidak ada wacana peleburan atau sintesis ideologis di antara peserta koalisi, sebelum koalisi terbentuk sebagaimana lazimnya sebuah koalisi ideologis terbentuk.

Di Perancis, misalnya, koalisi pada umumnya dilandasi oleh kepentingan politik aliran, sehingga biasanya koalisi adalah pengelompokan atas dasar aliran ideologi tertentu. Oleh sebab itu, sulit untuk dibayangkan adanya koalisi yang campur-aduk antarberbagai aliran. Memang kemudian, khusus di Perancis ada fenomena yang disebut kohabitasi. Namun, kohabitasi itu lebih sebagai pertemuan dua kelompok dengan elektoral ideologis yang berbeda dalam sebuah pemerintahan; hasil sebuah *political bargain* untuk mengefektifkan jalannya pemerintahan (Knapp dan Wright 2006).

Dalam konteks Indonesia, dengan tersingkirnya kalkulasi ideologis, tidak mengherankan jika kemudian koalisi-koalisi yang terbentuk mengikuti pola acak. Pada Pemerintahan SBY-JK partai-partai yang tergabung dalam koalisi pada putaran pertama mencakup kalangan sekuler dan Islam, yaitu PD, PKP, dan PBB. Pada putaran kedua, koalisi ini bertambah dengan masuknya PKS.

Setelah SBY-JK dinyatakan sebagai pemenang pada putaran pertama, tiga partai lain, yaitu PKB, PPP dan PAN menyatakan bergabung. Belakangan Partai Golkar juga turut masuk dalam koalisi, setelah JK berhasil merebut tampuk pimpinan partai itu dari tangan Akbar Tanjung. Dengan tergabungnya hampir seluruh partai besar dan menengah yang ada, terlihat “pola koalisi pragmatis” yang menyebabkan karakter ideologis koalisi SBY-JK menjadi sumir.

Pola tersebut terulang kembali pada Pemerintahan SBY-Boediono. Bedanya, jika sebelumnya koalisi awal pendukung SBY hanya melibatkan partai-partai menengah dan kecil, pada Pilpres 2009 koalisi awal pendukung SBY-Boediono telah melibatkan partai besar dan menengah. Saat dicalonkan pasangan SBY-Boediono telah didukung gabungan PD, PKS, PAN, PPP, dan PKB.

Setelah pasangan ini dinyatakan sebagai pemenang, Partai Golkar, dengan tabiat pragmatisme yang kental, kembali turut mendukung SBY setelah sebelumnya secara formal adalah partai inti yang menyokong Pasangan JK-Wiranto. Demikianlah, hingga saat ini koalisi non-ideologis berkuasa dengan melibatkan enam partai, dan menyisakan hanya tiga partai “oposisi”, yakni PDIP, Gerindra, dan Hanura.

Kondisi “koalisi yang bertemu di tengah jalan”, menggunakan istilah dari A.H Naja (Wijaya 2013), pada akhirnya memunculkan sebuah ikatan pragmatis, bahkan oportunistik, di antara peserta koalisi. Terbukti kemudian setelah masing-masing peserta koalisi mendapat kursi, partai tampak tidak merasa perlu untuk mengamati kinerja kadernya dalam koalisi, apakah telah sesuai dengan kepentingan ideologisnya atau tidak. Menteri-menteri

yang tidak menunjukkan performa memuaskan dibiarkan saja oleh partainya.

Karakter Pemerintahan

Selain pola koalisi yang demikian cair itu, dalam praktiknya garis kebijakan pemerintah dan oposisi, juga tidak mencerminkan sebuah karakter ideologis yang jelas. Studi Ambardi (2009) mengisyaratkan ketersingkirkan ideologi dalam pelaksanaan pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan parlemen. Pascaproses elektoral dan terbentuknya pemerintahan, aspek-aspek ideologis menjadi lemah. Masing-masing partai yang ada dalam pemerintahan, maupun yang seharusnya memainkan peran oposisi, dalam perlemen cenderung pada akhirnya menuju pada arah yang sama.

Pada masa Pemerintahan Gus Dur dan Megawati, adanya pemerintahan dan oposisi yang berkarakter politik kartel, mulai mengemuka. Hal ini tercermin dari bergabungnya partai-partai, apakah sekuler atau partai-partai Islam, menjadi sebuah kekuatan di belakang Gus Dur, termasuk Golkar, PDIP, PAN, PKB, PPP, PBB, PK (sekarang PKS), dan partai kecil lainnya. Pada masa Megawati, Koalisi Turah mengalami sedikit koreksi dengan keluarnya PK dan PKB, namun secara substansi tetap tidak mengubah kondisi kartel yang ada.

Fenomena kartel itu terlihat dari pembahasan beberapa undang-undang (UU). Dalam momen itu terlihat bagaimana partai-partai tersebut bergerak sebagai satu kelompok politik yang relatif solid. Meski seolah-olah ada perbedaan ideologi dan visi politik, yang memang cukup diperlihatkan pada saat kampanye. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan beberapa UU yang sebenarnya kental

Tabel 2. Komposisi Partai dalam Koalisi Pemerintah dan Oposisi

Pemerintahan	Koalisi Pemerintah	Oposisi
Abdurahman Wahid (1999–2001)	PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB, PK.	--
Megawati S. Putri (2001–2004)	PDIP, Golkar, PPP, PAN, PBB.	PKB dan PK
SBY-JK (2004–2009)	PD, PBB, PKPI, PKS, Golkar, PPP, PAN, PKB	PDIP
SBY-Boediono (2009–2014)	PD, PKS, Golkar, PPP, PAN, PKB	PDIP, Gerindra, Hanura

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

nuansa ideologisnya, seperti UU Sisdiknas, UU BUMN dan Tenaga Kerja, UU Perburuhan, atau UU Otonomi Daerah, partai-partai cenderung memiliki sikap seragam dan tidak menyisakan ruang bagi pertentangan ideologis (Ambardi 2009: 206–220).

Pada masa SBY, kondisi kartel ini tetap berlangsung. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan DPR memperlihatkan ketidakjelasan ideologi dan upaya melindungi kepentingan koalisi. Upaya mengangkat kasus-kasus pelik melalui mekanisme angket, misalnya, tampak sulit dilakukan karena upaya melindungi kepentingan koalisi. Kasus-kasus yang dimaksud di antaranya, kasus Bank Century dan mafia pajak.

Pada Pemerintahan SBY, harus pula diakui, beberapa partai mulai menunjukkan pola oposisi dan penentangan terhadap pemerintah. Uniknya salah satu partai yang cukup kuat menunjukkan penentangan ini, terutama di parlemen adalah PKS yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah di wilayah eksekutif. Dalam beberapa momen partai itu cenderung melawan kepentingan koalisi seperti dalam kasus Bank Century dan mafia pajak.

Sikap oposisi ditunjukkan pula pada kasus terakhir, dengan penolakan atas usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perpu MK), pada tahun 2013. Usulan kebijakan itu sendiri merupakan prakarsa SBY sebagai respons dari tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar, untuk menyelamatkan dan memperbaiki citra lembaga tersebut di mata masyarakat. Namun bagi PKS, Perpu MK belum diperlukan karena belum ada situasi yang teramat genting di MK yang dapat dijadikan alasan untuk dikeluarkannya sebuah aturan semacam perpu tersebut.

Terlepas dari hal itu, hubungan naik-turun antara SBY dengan rekan sekoalisi ataupun kelompok oposisi di parlemen secara umum lebih digerakkan pada hitung-hitungan praktis yang kurang mencerminkan kepentingan politik aliran. Beberapa momen justru menunjukkan adanya kesepahaman antara partai sekuler (PDIP) dan Islam (PKS), dan ketidaksepahaman antara kedua partai tersebut dengan partai-partai sealiran, dan akhirnya makin menunjukkan fenomena tergerusnya

peran ideologi politik dalam kehidupan politik kontemporer.

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 1950-an sarat dengan nuansa ideologi sehingga kerap sebuah daerah dikatakan telah dikuasai warna politik tertentu. Beberapa wilayah di Jawa Tengah, termasuk Surakarta, misalnya, kerap dikatakan sebagai daerah atau “basis merah” disebabkan salah satunya karena pimpinan pemerintahan, seperti walikota atau bupati, di wilayah-wilayah itu digenggam oleh kader PKI. Saat itu, masing-masing partai cenderung mengajukan kandidatnya dengan mengandalkan murni kekuatan kader dan propaganda.

Atmosfer itu tampak pudar pada kehidupan politik saat ini. Warna ideologi, di kebanyakan ajang pilkada, tidak lagi mengental. Hal ini disebabkan karena koalisi antarpolitis lintas ideologi menjadi sesuatu yang jamak terjadi. Adalah sesuatu yang wajar jika seorang kandidat didukung oleh gabungan partai lintas ideologi. Salah satu yang paling fenomenal adalah pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2007, saat Fauzi Bowo didukung oleh belasan partai (lintas ideologi), melawan Adang Daradjatun yang hanya didukung oleh satu partai (PKS).

Dalam lebih banyak kasus, seorang kandidat dapat memperoleh dukungan baik dari kalangan sekuler atau agama, melawan kandidat lain dengan komposisi dukungan yang sama. Uniknya, hal itu berlaku pula pada pasangan yang berlatar belakang ideologi yang sama, namun tetap didukung oleh partai-partai dengan ideologi yang beragam. Tidak salah jika kemudian beberapa kalangan menduga jika dukungan itu bermotif pragmatisme, dengan harapan ada banyak keuntungan saat pasangan yang didukung sebuah partai berhasil menduduki jabatan. Hal yang khas terjadi adalah jual beli dukungan, di mana bersatu atau bubarinya sebuah kesepakatan untuk mendukung seorang kandidat kerap pada akhirnya ditentukan pada hal-hal yang bersifat pragmatis, dalam hal ini jumlah uang yang disepakati.

Pragmatisme juga ditopang oleh kontestasi politik di tingkat lokal yang cenderung menonjolkan aspek-aspek yang lebih konkret.

Pada tingkat itu, kandidat akan lebih terfokus untuk mengedepankan wacana seputar mengatasi persoalan-persoalan riil, daripada menonjolkan agenda-agenda ideologis (Noor 2009: 36). Dalam nuansa seperti inilah peran ideologi dalam kampanye menjadi semakin tersingkirkan.

Menguatnya gejala pragmatisme atau oportunisme juga terlihat dari penyikapan atau pemaknaan pilkada di benak masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya, dari pernyataan seorang responden berinisial A. Dia mengaku bahwa ayahnya, Haji E, adalah seorang tokoh publik di Kecamatan Maja, Kabupaten Serang, Banten, yang juga seorang perantara politik (*political broker*) yang tidak pernah gagal. Terakhir, ayahnya adalah bagian dari tim sukses yang berperan sebagai *vote getter* bagi calon gubernur yang juga Petahana (*Incumbent*) Gubernur Banten Atut Chosiyah, pada Pilgub Banten untuk daerah Maja.

A mengatakan bahwa dalam melakukan manuver politiknya, ayahnya dapat saja dengan mudah berpindah-pindah “warna partai”, (biru, kuning, merah, hijau) asalkan partai itu dapat memberikan hasil konkret untuk masyarakat. A mengatakan:

“Jadi bapak saya itu (sebelum hari pemilihan, pen) akan mengumpulkan warga untuk menanyakan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu, kebutuhan itu ditawarkan kepada siapa saja (partai mana saja, pen) yang akan memenuhinya. Jadi, semacam kontrak. Bapak kemudian akan menginformasikan kepada warga partai mana yang bersedia memenuhinya dan oleh karenanya meminta warga untuk memilih partai itu pada saat hari pemilihan ... dijamin 80–90% suara akan diarahkan pada partai itu”⁴ (Wawancara dengan narasumber A di Depok, 15 Desember 2013).

Selanjutnya A mengatakan, dulu memang bapaknya, yang saat ini telah berusia 70 tahun dan juga pengusaha lokal, adalah pendukung partai tertentu. Namun saat ini, bapaknya A tidak lagi merasa terikat pada partai mana pun. Menurut A, sikap itu bagus untuk warga, karena ada hasil nyata yang dirasakan oleh mereka, seperti jalan yang menjadi mulus, dan rumah-rumah ibadah

yang menjadi lebih bagus. Menurut pengakuan A, dalam melakukan aksi politiknya itu, sebagai tokoh masyarakat bapaknya sama sekali tidak mengambil keuntungan pribadi.

Nuansa pragmatisme dalam semangat pemanfaatan (utilitarianisme) tersebut di atas, tampak hampir merata terjadi di banyak wilayah di tanah air. Masyarakat terlihat tidak ingin momen pilkada lepas begitu saja tanpa meninggalkan “hasil konkret” bagi mereka. Di satu sisi, hal ini memberikan semacam berkah bagi mereka. Namun di sisi lain, ajang pilkada menjadi kehilangan ruh, atau tereduksi maknanya menjadi sekadar transaksi politik tanpa adanya upaya mencerahkan pemahaman politik masyarakat, yang dapat menguatkan sebuah pemerintahan yang demokratis dan efektif.

Dengan demikian, pilkada juga tidak sepenuhnya menjadi ajang komitmen pengembangan idealisme atas dasar keyakinan atau ideologi politik yang dianut. Pragmatisme yang telah demikian menguat ini menyebabkan seorang Yusril bahkan sampai pada kesimpulan bahwa uang adalah salah satu kunci terpenting untuk berhasil dalam dunia politik, terutama untuk memenangi momen-momen pemilihan.⁵ Pandangan Yusril itu terkesan merendahkan kualitas politik bangsa kita saat ini, namun kondisi seperti itu di lapangan tampak kerap sulit untuk dihindari.

Salah satu persoalan laten yang menyebabkan semua itu terjadi, adalah masih belum kuatnya kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi. Kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang akut pada pihak-pihak tertentu menyebabkan rasionalitas dan kemandirian berpolitik menjadi sulit untuk berkembang. Tidak terlalu salah premis yang mengatakan bahwa demokrasi akan tumbuh pesat di Indonesia jika US \$ 1 telah mencapai setidaknya Rp6.000. Esensi dari premis itu adalah kemapanan ekonomi sebuah bangsa, yang menimbulkan kemakmuran menyeluruh, akan menumbuhkan sebuah model partisipasi yang lebih independen dari masyarakatnya. Namun, sejauh kemapanan ekonomi itu belum terwujud,

4 Wawancara dengan A, seorang warga Maja yang saat ini berdomisili di Depok, di Depok, Jawa Barat, 15 Desember 2013.

5 Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra kepada peserta diskusi pada acara Diskusi Publik, “Masa Depan Neo-Masyumi” yang diselenggarakan oleh Inilah.com, pada 24 November 2013, di Jakarta.

politik uang dan sejenisnya akan tetap menjadi penyakit politik yang sulit untuk ditangkal.

Kenyataannya, ketergantungan ekonomi itulah yang menyebabkan dinasti politik di beberapa daerah mampu bertahan hingga lama. Berdasarkan kajian yang ada di Jepang atau Filipina, sebuah dinasti politik cenderung eksis di wilayah-wilayah yang terbelakang secara ekonomi (Junior, dkk. 2012). Pada wilayah itu masyarakat menjadikan elemen-elemen atau tokoh-tokoh di dalam dinasti sebagai tumpuan kehidupan keseharian mereka dengan kesetiaan atau loyalitas politik sebagai konsesinya. Dengan adanya ketergantungan ekonomi pada patron politik tersebut yang sudah cukup menahun, amat sulit bagi warga untuk bertindak independen dalam dunia politik.

Menurut penelitian Junior, dkk. (2012), sayangnya masyarakat yang telah menopang sebuah dinasti politik tidak selalu mendapatkan manfaat yang memuaskan. Kenyataannya, tetap saja mereka hidup dalam keterbatasan, yang pada akhirnya menyebabkan ketergantungan mereka pada dinasti terus berlanjut. Situasi kemiskinan di Provinsi Banten, misalnya, telah turut menyuburkan dinasti politik yang belum tergoyahkan hingga kini, dan secara tidak langsung menyuburkan praktik *money politics* dengan segenap variannya.

Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah politik uang tetap terjadi pada momen-momen selepas pilkada dan merambat naik hingga melibatkan pihak-pihak di pemerintah pusat. Kasus Pilkada Lebak, misalnya, yang menyeret Akil Mochtar sebagai Hakim MK, telah menunjukkan fenomena ini. Kondisi ini semakin memperlihatkan hilangnya idealisme dalam dunia politik dan tergantikan dengan hal-hal yang bersifat oportunisme yang berujung pada kepentingan mempertahankan jabatan atau memperkaya diri dengan cara apa saja. Melakukan rente jabatan menjadi hal yang semakin jamak ditemui.

PENUTUP

Peran ideologi politik pernah demikian mendominasi kehidupan dan konstelasi politik di tanah air. Hal ini terlihat, salah satunya, dari kajian penting tentang tipologisasi partai-partai politik yang tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan ideologi politik sebagai pijakan analisisnya.

Ideologi politik, dengan demikian, dianggap sebagai penggerak aktivitas politik. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, semakin terlihat bahwa peran ideologi itu mulai tergantikan dengan hal-hal yang bersifat pragmatis.

Tulisan ini memperlihatkan bagaimana pergeseran itu menampakkan diri, baik dalam tatanan teoritis maupun praktis. Pada tingkat elite atau parpol, pragmatisme pada umumnya digerakkan oleh keinginan untuk tetap berada dalam *domain* atau pusran kekuasaan. Adapun pada tingkat masyarakat, paling tidak ada dua faktor yang turut menentukan perilaku politik mereka.

Pertama, pilihan rasional (*rational choice*) masyarakat yang telah menimbulkan semacam skeptisisme politik dan objektivitas masyarakat dalam mengevaluasi kehidupan politik. Saat ini masyarakat dapat melakukan sebuah evaluasi personal atau pilihan-pilihan rasional terhadap kondisi politik yang dihadapinya daripada “mengembalikan” hal itu pada aliran politik yang ada di lingkungannya. Situasi ini tidak dapat dihindari lagi mengingat semakin membaiknya tingkat pendidikan bangsa Indonesia dan semakin terbukanya jaringan informasi yang menetengahkan beragam informasi mengenai politik.

Kedua, masalah kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik. Problem klasik yang muncul dalam dunia politik yang berhubungan dengan masalah ekonomi, terkait dengan persoalan kemandirian masyarakat dalam berpolitik. Bagi sementara kalangan, asumsi semacam ini, yang terutama menggunakan pendekatan modernisasi di tahun 1960-an, sudah usang dan tidak lagi relevan. Namun, untuk menghilangkan sama sekali variabel kemandirian ekonomi ini dari kehidupan politik, jelas merupakan hal yang tidak bijak. Kenyataannya, pada kebanyakan masyarakat, kecenderungan pilihan rasional berpotensi tergerus oleh persoalan keterbatasan atau ketidakmandirian ekonomi. Tentu saja ada faktor lain yang patut pula diperhitungkan manakala mencari penyebab munculnya gradasi peran ideologi politik dalam kehidupan politik kontemporer. Namun, tulisan ini tidak dalam kapasitas untuk mengkajinya.

Terlepas dari itu, tulisan ini mengisyaratkan kondisi politik yang dapat memudahkan makna demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu,

sudah sepantasnya jika pihak-pihak yang terkait mulai menata dan meningkatkan peran ideologi dalam kehidupan berpolitik. Hanya dengan itulah demokrasi rasional yang bekerja dalam koridor idealisme, yang mencerminkan kebesaran budaya anak bangsa, dapat tumbuh berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.

PUSTAKA ACUAN

- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1963. *The Civic Culture: The Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Almond, Gabriel A. 1997. "Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik". Dalam Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel. Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-LSI.
- Amir, Zainal Abidin. 2003. *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Apter, David. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Basalim, Umar, ed. 2002. *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Dhakidae, Daniel. 1999. "Partai-partai Politik Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-patahan Sejarah" dalam Tim Penelitian dan Pengembangan Kompas. *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program*. Jakarta: Kompas.
- Evans, Kevin R. 2003. *The History of Political Parties and General Elections in Indonesia*. Jakarta: Arise Consultancies.
- Feith, Herbert and Castles, Lance, eds. 1970. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and The Last Man*. New York: Free Press.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. New York: Free Press.
- Haris, Syamsuddin, ed. 2004. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai. Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia, LIPI and IMD.
- Hidayat, Syahrul, ed. 2008. *Kerangka Penguatan Partai Politik di Indonesia*. Depok: Puskapol.
- Husein, Harun. 2012. "Proporsional Terbuka: Yang Alpa pada Pengalamannya". Dalam "Teraju-Republika, 15 Mei 2012", dalam <http://bheleque.wordpress.com/2012/05/15/teraju-republika-15-05-12/>
- Jay, Robert. 1963. *Religion and Politics in Rural Central Java*. New Haven: Southeast Asian Studies, Yale University.
- Junior, Edsel Beja, Mendoza, Ronald U., Venida, Victor S., and Yap, David B. 2012. "Inequality in democracy: Insights from an empirical analysis of political dynasties in the 15th Philippine Congress", *MPRA Paper* No. 40104.
- Katz, Richard and Mair, Peter. 1994. *How Party Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies*. London: Sage Publication.
- Katz, Richard and Mair, Peter. 1996. "Cadre, Catch-all or Cartel? A Rejoinder". *Party Politics*, 1 (1), 5-38.
- Knapp, Andrew and Wright, Vincent. 2006. *The Government and Politics of France*. London: Routledge.
- Muchlis, Edison, ed. 2007. *Reformasi Kelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mujani, Saiful dan Liddle, William. 2010. "Voters and the New Indonesian Democracy". Dalam Aspinnall, Edward dan Mietzner, Marcus. *Problems of Democratisation in Indonesia*. Singapore: ISEAS: 75-99.
- Noor, Firman. 2009. "Evaluasi Kampanye Pemilu Legislatif 2009: Analisis atas Pesan, Media dan Bentuk Kegiatan Kampanye". Dalam Lili Romli, ed. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2009*. Jakarta: LIPI Press.
- Noor, Firman. 2009. "Mencermati Kampanye Pileg 2009: Gradasi Peran Partai dan Gejala Pragmatisme", *Jurnal Penelitian Politik*. 6 (1).
- Plano, Jack C., Riggs, Robert E. dan Robin, Helena S. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta. Rajawali Press.
- Ranney, Austin. 1993. *Governing, An Introduction to Political Science*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
- Romli, Lili. 2008. *Pelembagaan Partai Politik Pasca-Orde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB, PBB, PBR dan PDS*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Suharsono. 1999. *Cemerlangnya Poros Tengah. Terpilihnya Gus Dur terobosan Besar Elite Politik*. Jakarta: Perennial Press.

- Tan, Paige Johnson. 2006. "Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy". *Contemporary Southeast Asia*, 28 (1).
- Ufen, Andreas. 2005. "Cleavages, Electoral Systems and the Politicization of Islam in Indonesia and Malaysia", *IIAS Newsletter*, # 37, June.
- Wijaya, Muhammad Akbar. 2013. "Koalisi Terseok-Seok", *Republika*, 17 Oktober 2013.

Sumber Lain

- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/452798> (diunduh pada 3 Januari 2013)
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/29> (diunduh pada 3 Januari 2013)
- Tribunsumsel.com/Tommy Sahara (diunduh pada 3 Januari 2013)
- <http://usum.co/news/read/2013/12/21/ini-jawaban-pks-soal-penolakan-perppu-mk/> (diunduh pada 3 Januari 2013)